

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP ANGGOTA DPRD
SUMATERA UTARA YANG PINDAH PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Strata Satu (S1)

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Oleh:

DIAN FIRMANSYAH

NIM: 23151001



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAN FIRMANSYAH

Nim : 23151001

Prodi : SIYASAH

Judul Tesis :ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP ANGGOTA DPRD
SUMATERA UTARA YANG PINDAH PARTAI POLITIK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi yang berjudul: ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP ANGGOTA DPRD SUMATERA UTARA YANG PINDAH PARTAI POLITIK adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 15 Agustus 2019

Penulis

DIAN FIRMASYAH

NIM. 23151001

**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara
yang Pindah Partai Politik**

SKRIPSI

Oleh :

DIAN FIRMANSYAH

NIM: 23151001

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Khalid, SH., M.Hum

NIP. 19750326 200501 1 005

Syofiaty Lubis, SH., MH

NIP. 19740127 200901 2 002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syariah Dan
Hukum
UIN Sumatera Utara

Fatimah, S.Ag, MA

NIP.197103201997032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik, An. Dian Firmansyah, Nim 23151001. Program Studi Siyasah telah dimunaqasyah dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 4 November 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Siyasah.

Medan, 4 November 2019.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

Ketua

Zaid Alfauza Marpaung, M.H

NIP. 198808242015031004

Sekretaris

Heri Firmansyah, M.A

NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota

Dr. Khalid, M.Hum

NIP. 19750326 200501 1 005

Drs. Sudianto, M.A

NIP. 19570505 199303 1 002

Heri Firmansyah, M.A

NIP. 19831219 200801 1 005

Zaid Alfauza Marpaung, M.H

NIP. 19880824 201503 1 004

Mengetahui

Dekan fakultas Syariah

UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, M. Hum

NIP. 19770321 2009 01 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Analisis Fiqh Siyasah terhadap Anggota DPRD Sumatra Utara yang Pindah Partai Politik. Latar belakang dalam skripsi ini adalah banyaknya anggota DPRD Sumatra Utara yang sudah di PAW (Pergantian Antar Waktu) di karenakan telah pindah partai politik dan bagaimana alasannya, sedangkan di fiqh siyasah menurut *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* tidak ada diatur. Adapun Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah ingin membahas tentang alasan anggota DPRD Sumatera Utara yang pindah partai politik dan kewenangan partai politik pengusung terhadap anggota DPRD Sumatera Utara menurut *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* dalam tinjauan Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari riset di lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meode deskriptif dan analisis deduktif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Sumatera Utara yang di PAW, Sumber data sekunder adalah UU. No. 2 Tahun 2011, buku-buku yang dianggap relevan dan kapabel dengan masalah yang akan diteliti dengan iming-iming alat peraga kampanye maupun insetif dana kampanye. Kemudian kedua: kewenangan partai politik pengusung terhadap anggota DPRD Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pertama: Alasan anggota DPRD Sumatera Utara yang pindah partai politik, yaitu faktor ideologi partai, faktor internal partai, faktor kekhawatiran terhadap masa depan partai, faktor adanya tawaran pindah partai lain dengan iming-iming alat peraga kampanye maupun insetif dana kampanye. Kemudian kedua: kewenangan partai politik pengusung terhadap anggota DPRD Sumatra Utara menurut *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* dalam tinjauan Fiqh Siyasah. Hal ini sesuai dengan fiqh siyasah karena pada masa khalifah umar berkuasa istilah ini mengacu pada pergantian beberapa sahabat yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan Negara dan memilih pengganti kepala Negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjukan umar menentukan siapa saja penggantinya setelah beliau meninggal. Memang pada masa ini eksistensi *Ahl al-h{all wa al'aqd* belum ada, tetapi pada pelaksanaannya para sahabat senior telah menjalankan peranya sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintah dengan konsep siyasah yang mana kewenangan pemberhentian langsung dipegang oleh khalifah.

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah swt yang telah memberikan kemampuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Islam dengan melakukan perubahan dan pencerahan kepada umat manusia. Dalam rangka menyelesaikan studi pada strata satu ini penulis telah berupaya untuk mengangkat karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **Analisi FiqhSiasah Terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan rasa hormat yang tulus, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag yang telah mengijinkan saya menuntut ilmu di kampus tercinta UIN Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Zulham, S.HI. M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua dan Sekretaris serta staf jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) yang telah menjadi motivasi dalam penulis karya ilmiah.

3. Bapak Dr. Khalid, SH., M.Hum selaku pembimbing I, yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis ketika menulis skripsi ini.
4. Ibu Syofiaty Lubis, SH., MH selaku pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktu dan ilmunya untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu ketua jurusan Siyasah Fatimah, S.Ag, MA beserta Seluruh staf pengajar dan civitas akademika pada jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Junaidi dan Elly Ruslita) yang telah menjadi inspirasi, pembangkit semangat dan motivasi kepada penulis agar kiranya supaya selesai dari perkuliahan dengan sukses.
7. Kepada bapak Hardi Sebagai Konsultan Persidangan Kantor DPRD Sumatera Utara yang telah memberi motivasi dan wawasan tentang skripsi ini.
8. Kepada bapak Hanalson sebagai Sekjen DPD Partai Demokrat Sumatera Utara yang telah memberi wawasan tentang skripsi ini.
9. Kepada bapak Irwansyah, SH., MH sebagai Demisioner KPU dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi motivasi serta wawasan tentang skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa dan kepada seluruh sahabat- sahabat yang telah banyak membantu penulis selama ini baik dalam penulisan skripsi dan dalam hal lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan lagi namanya satu- persatu.

Akhir kalam kepada Allah jualah kita mohon ampun dan berserah diri, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi sumbangan untuk menegakkan ajaran-Nya dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 15 Agustus 2019

Penulis

DIAN FIRMANSYAH

NIM. 23151001

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Kerangka Pemikiran	16
F. Kajian Terdahulu	17
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	20

BAB II. LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Partai Politik	23
B. Sejarah Partai Politik	26
C. Fungsi Partai Politik.....	31
D. Hak dan Kewajiban Partai Politik	31
E. PAW Anggota DPRD Sumatera Utara menurut Undang-Undang.....	34
F. Pergantian Partai Politik Dalam Islam	38
G. Sejarah <i>Ahl al-h{all wa Al-Aqd</i>	41
H. Kedudukan <i>Ahl al-h}all wa Al-Aqd</i>	42
I. Peran <i>Ahl Al-h}all wa Al-Aqd</i>	46

BAB III. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah DPRD Sumatera Utara.....	55
-------------------------------------	----

B. Fungsi DPRD Sumatera Utara	59
C. Tugas dan Wewenang DPRD Sumatera Utara	59
D. Hak dan Kewajiban DPRD Sumatera Utara	61
E. Struktur Organisasi DPRD Sumatera Utara	63
F. Fraksi-Fraksi di DPRD Sumatera Utara	68
G.	

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Alasan-Alasan Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik	70
B. Kewenangan DPRD Sumatera Utara dapat disesuaikan dengan Kedudukan <i>Ahl Al-h}all Wa al-Aqd</i>	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran partai politik dalam sistem pemerintahan yang demokrasi tidak bisa dihindari. Kemerdekaan seorang untuk berserikat dan menyuarakan pendapatnya diidentikan dengan kehadiran partai politik dalam suatu pemerintahan yang demokrasi.¹ Partai politik secara umum dapat dikatakan bahwa suatu kelompok terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai- nilai dan cita- cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya.²

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:³

¹Miftah Toha, *Birokrasi Politik dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 79.

²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Puaka Utama, 2014), hlm. 403-404.

³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupannya bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menyalurkan kebijakan Negara.
4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Jika fungsi partai politik tidak berkembang dengan baik maka sulit bagi demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan fungsi tersebut partai politik dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin Negara pada jenjang-jenjang dan posisi tertentu.⁴ Dalam konteks di Indonesia, seorang anggota DPR yang direkrut suatu partai politik sebagai peserta pemilu untuk menjadi anggota DPR, setelah dipilih oleh rakyat pemilih dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai anggota DPR,

⁴Jimiy Asshidiqie, “ *Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi*”, Jurnal Konsitusi, Vol. 3. No. 4, (Desember 2006), hlm.9.

memiliki hubungan hukum dengan partai politik yang mengusungnya dan juga dengan rakyat yang telah memilihnya.

Partai politik selain memiliki fungsi juga memiliki hak yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, partai politik berhak:

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Negara.
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengusulkan perberentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik.
11. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak partai politik dalam pergantian antar waktu anggota DPR atau sering dikenal dengan istilah *recall* yang terdapat dalam angka 6 dan angka 7 selain itu *recall* juga di atur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d, g, dan h

Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi anggota partai politik lain.

Adapun Fakta yang ditemukan penulis di lapangan yaitu kasus anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik. Hardi selaku Konsultan Persidangan DPRD SUMUT mengatakan bahwa Ada beberapa kasus Perpindahan Partai Politik Dikalangan Anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2014-2019. Adapun beberapanama yang bersangkutan ialah:

1. Syahrial Tambunan dari Partai Demokrat ke Partai Nasdem, Dapil Deli Serdang , yang menggantikan oleh Jamilah.
2. Astra Yudha Bangun dari Partai Gerindra ke PDI. Dapil Karo, Dairi, Pakpak, yang menggantikan oleh Robert Luban Tobing.
3. Rony Ronaldo Situmorang dari Partai Demokrat ke Nasdem. Dapil Simalungun Siantar, yang menggantikan Megalia Agustina.
4. Jenny Riany Luci Brutu dari Partai Demokrat Ke Nasdem. Dapil Karo, Dairi, Pakpak, yang menggantikan Layari Simutaban.

5. Januari Siregar dari Partai PKPI ke Perindo. Dapil Medan SUMUT 1, yang menggantikan Royana P. Marpaung.
6. Parlinsyah Harahap dari Partai Gerindra ke Demokrat. Dapil Tapanuli Selatan, Paluta, Palas.Mandailing Natal, Padang Sidempuan, yang menggantikan Abdul Manan Nasution.⁵

Adapun dalam KasusPAW oleh partai politik, menurut Hanalson selaku Staf di DPD Partai Demokrat Sumut mengatakan bahwa Kasus Syahrial Tambunan, Jeny Brutu dan Rony Ronaldo Situmorang yang di PAW oleh Partai Demokrat itu benar terjadi dikarenakan Syarial Tambunan, Jeny Brutu dan Rony Ronaldo Situmorang berpindah partai dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD SUMUT. Didalam Peraturan Mendagri dan Peraturan KPU No. 13 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif, KPU sempat menetapkan, anggota DPR atau DPRD yang mencalonkan diri dari partai yang lain dengan partai pengusungnya terdahulu harus mundur. Selain Syarial Tambunan juga ada J. Brutu yang Pindah Partai ke Partai Nasdem dan juga Rony Ronaldo Situmorang yang Pindah ke Partai Nasdem di dalam Peraturan PKPU harus ada surat pengunduran diri dari partai sebelumnya jika tidak ada maka mereka akan di coret dari KPU dan tidak bisa

⁵Hardi, Konsultan Persidangan, Wawancara di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Mei 2019.

mencalonkan. PAW juga tercantum dalam AD/ART Partai Demokrat Pasal 17 tentang Pemberhentian Anggota telah sesuai dengan pemerintah.⁶

Irwansyah M.H selaku Demisioner KPU mengatakan pengajuan Pergantian Antar Waktu pertama kali melalui partai. Mekanisme tercantum dalam UU. No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Recall* itu terjadi bila tidak memenuhi syarat sebagai Anggota DPR dikarenakan, meninggal, melanggar kode etik, serta sebab-sebab yang lain. Mekanisme pengajuan dari Partai Pengusung/Partai Politik kemudian dimasukkan ke KPU, KPU memproses latar belakang *recall*/Pergantian Antar Waktu dan dilampirkan baru dimasukkan ke KPU untuk mengkaji dan menganalisis, kemudian KPU mengajukan nama calon Pergantian Antar Waktu di urutan selanjutnya, rekomendasi KPU yang ditanda tanggani Ketua KPU, setelah proses di KPU dibawa berkasnya ke DPRD untuk proses pergantian atau penetapan pergantian *recall*.⁷

Istilah partai dalam Islam disebut dengan perkataan $H\{iz|b$. Partai ($H\{iz|b$) secara *lughawi* mempunyai makna: Pertama, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas, Kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan

⁶Hanalsan, Sekjen DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Wawancara di Kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 20 Mei 2019.

⁷ Irwansyah, Demisioner KPU, Wawancara di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 21 Mei 2019.

dan persaudaraan, Ketiga, kader serta partisipannya. Mengikuti Pengertian istilah , partai atau *H{iz|b* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.⁸ Perkataan *H{iz|b* terdapat beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

Artinya: “ *Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh yang bersekutu itu, mereka berkata:” inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita”.Dan benarllah Allah dan Rasul-Nya.Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan”* (QS. Al-Ahzab:22).⁹

Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd dalam sejarah islam, pembentukanya pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umaiyah. Khalifah Al-Hakam II (961-967 M) membentuk majelis al-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar Negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan majelis syura ini setingkat dengan pemerintah .Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut.Majelis inilah yang melakukan musyawarah

⁸. Hasanudin Yusuf, “*Partai Politik Dalam Presfektif Islam*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No.1 (Januari 2014), hlm. 487-488.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemanya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 421

dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah Negara. Jadi, daulat Bani Umaiyah II DI Sepanyol menghidupkan lembaga legislative yang telah hilang dalam sejarah politik islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Darmaskus.¹⁰

Menurut Al-Mawardi, *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* harus melalui dua proses pemilihan oleh *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* dan melalui proses penyerahan mandate oleh pemimpin sebelumnya. *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat(dinobatkan) oleh mereka.¹¹

Al-Mawardi tidak memberikan definisi secara langsung apa yang dimaksud dengan *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd*. Beliau hanya memberikan konsep baru dalam pengangkatan seorang raja selain dari pada pemberian mandat yang telah berlangsung secara turun temurun dilakukan oleh dinasti Abbasiyah dan dinasti-dinasti sebelumnya. Mengingat pentingnya kedudukan *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd*, maka Al-Mawardi menentukan syarat-syarat sebagai

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pernada Pustaka Media Group. 2014), hlm.163-164

¹¹Farid Abdul Kholiq, *Fi Al-Fiqh As- Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Ash-Syura Al-'Aql Al-Musawah*, (Terj. Faturrahman A. Hamid, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 108.

anggota *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd*. Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:

1. Memiliki sifat ‘Adil yang mencakup semua syarat-syaratnya.
2. Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri imam tersebut.
3. Memiliki pendapat (ra’yu) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

Selanjutnya, *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* di harus mempunyaikredibilitas pribadi yang tinggi, ia juga mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala Negara dengan syarat-syaratnya serta bijaksan sehingga dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala Negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat

untuk di baiat(dinobatkan) oleh mereka.Ada beberapa pengertian *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* diantaranya sebagai berikut:¹²

1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala Negara atau disebut pula dengan istilah *Ahl al-Ijtha>d* dan *Ahl al-Ikhtiya>r*.
2. orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.
4. *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Dasar dalam permasalahan ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas

¹²Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), hlm. 255-256.

untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin. Sebagaimana yang dipaparkan AL-Mawardi apabila “*Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd*” berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatnya.¹³

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.

Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* terbatas pada dua hal, yaitu:

¹³Al- Mawardi, *Al- Ahkaamus-sulthanniyyah wal-wilayatud-diniyyah* (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam), (Jakarta: Gema Isnaini Press, 2000), hlm. 39

1. Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
2. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Selain dua hal di atas, lembaga *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.¹⁴

Pada awalnya islam memang tidak mengenal sistem partai dalam mengurus dan mengatur Negara, yang ada adalah sistem musyawarah, penunjukan, dan bai'at terhadap seseorang dalam kasus pemilihan kepala negara. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui representative ummah yakni lembaga *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* yang menetapkan seseorang menjadi pemimpin ummat.

Setelah wafatnya Usman bin Affan terjadi perdebatan dikalangan kaum muslim salah satunya perselisihan mengenai immamah (kepemimpinan kaum muslim). Sebagai pengganti Usman bin Affan sebagian umat Islam

¹⁴Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 184-185.

memilih Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin selanjutnya namun terjadi perlawanan yang dilakukan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan di Damaskus. Muawiyah yang menjadi gubernur di Damaskus tidak mengakui ke khalifahan Ali bin Abi Thalib.¹⁵ Pada saat yang bersamaan umat islam terpecah belah menjadi dua kubu, Pertama, kubu yang mendukung pembaiatan Ali bin Abi Thalib, Kedua, kubu yang mendukung Muawiyah sebagai khalifah setelah Utsman.

Dalam perkembangan selanjutnya, para pendukung Ali terpecah menjadi dua. Kelompok pertama disebut dengan Syiah, yaitu orang-orang yang tetap setia dan loyal dengan kekhalifahan Ali hingga wafatnya. Kelompok kedua disebut Khawarij, yaitu kelompok yang pada awalnya begitu amat sangat setia pada Ali tapi karna sebuah peristiwa bernama peristiwa At-Tahkim, akhirnya mereka keluar dari barisan pendukung Ali, bahkan menjadi pembangkang dan mengancam Ali dan Pendukungnya. Dari sinilah awal mula munculnya partai politik islam yang kemudian melahirkan sekte-sekte politik pada periode selanjutnya, seperti Sunni, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah serta sekte-sekte lainnya.¹⁶

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 121.

¹⁶Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 4.

Persoalan Anggota DPRD Sumatera Utara yang pindah partai politik menimbulkan perdebatan dikalangan politisi walaupun telah diatur melalui undang-undang, sedangkan dalam Islam pemberhentian anggota perwakilan oleh partai (*hizb*) merujuk pada nilai-nilai ajaran Islam. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi bahasan dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa alasan-alasan Anggota DPRD Sumatera Utara yang pindah partai politik?
2. Bagaimana Kewenangan partai politik pengusung terhadap anggota DPRD Sumatera Utara menurut *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* dalam tinjauan fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik.

2. Untuk mengetahui kesesuaian kewenangan partai politik pengusung terhadap anggota DPRD Sumatera Utara dengan kedudukan *Ahl al-h{all wa Al- 'Aqd*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan para pembaca khususnya mengenai pengaturan recall anggota DPRD Sumatera Utara oleh partai politik, dan menambah wawasan dalam disiplin ilmu Fiqh Siyasah.
2. Secara Praktis. Untuk memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini serta untuk memenuhi salah satu syarat bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai sebuah ajaran memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan sebagai sebuah ajaran yang Universal maka ajaran Islam haruslah Fleksibel agar supaya dapat menjawab persoalan yang dating agar ummat tidak sulit dalam mengerjakan ajaran tersebut.

Dengan demikian maka islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam Partai Politik, disamping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut.

PAW anggota DPRD oleh Partai politik untuk diberhentikan dan digantikan oleh anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatannya merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan dikarenakan ia berada diantara kedudukan seorang sebagai wakil rakyat dan kedudukan seorang sebagai anggota partai politik.

F. Kajian Terdahulu

Penulis menemukan penelitian sebelumnya, yaitu: Skripsi Renisa Fitri: Analisis Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR.(Fakultas Syari'ah/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Pada skripsi ini dibahas tentang peraturan hak recall partai politik yang diatur dalam pasal 239 ayat (2) huruf d g dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selain itu hak recall partai politik juga diatur dalam pasal 12 huruf g, dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai politik.

Hak recall yang dilakukan partai politik kepada anggota DPR bukan merupakan kewenang-wenangan melainkan merupakan bentuk pengawasan partai politik kepada anggotanya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan rakyat. Karena partai politik merupakan sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila Partai Politik melakukan kesewenang-wenangan pada anggotanya maka ia akan mendapatkan sanksi dari masyarakat dengan tidak memilih lagi partai politik yang bersangkutan pada pemilihan berikutnya.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan diatas, maka penelitian yang penulis lakukan belum mendapat perhatian secara spesifik, sementara permasalahan ini menurut penulis sangat penting untuk dikupas tuntas demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama.

G. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah,

sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁷ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun kelapangan adalah sangat penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, dan penelaan dokumen. Dalam hal ini model penyelesaian pembagian warisan berdasarkan kesepakatan dengan asas manfaat. Karena data yang dibutuhkan peneliti ada di lapangan yaitu Kantor DPRD Sumatera Utara. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari para informan.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian Satu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Sumber data primer. Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan anggota DPRD Sumatera Utara, Anggota Partai Politik serta Tokoh Masyarakat.
- b). Sumber data Sekunder. Yaitu data-data yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik yang berkaitan dengan fiqh Siyasah.
- c) Sumber tersier, Yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan skunder. Diantaranya, data monografi DPRD Sumatera Utara, Kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah dan lainnya.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah data lapangan ditemukan, diteliti dan diproses, begitu juga data kepustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa *Kualitatif* dengan metode deduktif. Yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum atau

kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh, menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Uraian pada penyusunan skripsi ini di bagi kepada beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan ,batasan istilah, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Membahas tentang tinjauan umum anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik, bab ini berisi tentang pengertian partai politik, sejarah partai politik terhadap anggota DPR, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan tugas partai politik, Pengertian partai politik dalam islam, sejarah *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd*, kedudukan *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd*, dan peran *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd*.

BAB III: Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari: Sejarah DPRD Sumatera Utara, keadaan geografis dan keadaan demografis DPRD Sumatera Utara.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan yang terdiri dari analisa tentang Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik, Pembagian Fiqh Siyasah tentang Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik.

BAB V: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis .

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Partai Politik

Menurut UU No.2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka memahami partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik dalam Negara, berikut beberapa pengertian mengenai partai politik, yakni:

1. Carl J. Friedrich: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

2. R.H Soltou: Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
3. Miriam Budiardjo: partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹⁸

Secara umum Partai Politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

Sebelum mengulas secara ringkas perkembangan parpol di Indonesia, saya harus menyampaikan terlebih dahulu bahwa di dunia ini, sistem kepartaian yang diterapkan oleh negara-negara di luar sana tidak selalu

¹⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 160

sama. Sistem kepartaian bervariasi, dimana secara garis besar dapat digolongkan menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Sistem partai tunggal, yaitu parpol yang eksis di suatu negara hanya satu.

Secara otomatis, pemerintah negara tersebut tidak memiliki partai oposisi. Kontrol terhadap kekuasaan pemerintah dilakukan dalam internal parpol itu sendiri. Beberapa negara yang menerapkan sistem partai tunggal yaitu Kuba, Korea Utara, Cina, Pantai Gading, dan Guinea

2. Sistem dwi partai, yaitu hanya ada dua parpol yang eksis di suatu negara.

Oleh karena hanya ada dua partai, peran yang dimainkan sangat jelas, satu partai sebagai penguasa, satunya lagi sebagai oposisi. Kedua partai berkompetisi "abadi" satu sama lain. Amerika Serikat merupakan negara yang menerapkan sistem dwi partai.

3. Sistem multipartai, yaitu parpol yang eksis lebih dari dua. Jumlahnya

persisnya bervariasi. Munculnya multipartai bisa disebabkan oleh konteks sosial negara itu yang majemuk. Kemajemukan bisa dilihat dari berbagai hal misalnya, dari ras, suku, agama, kebudayaan, sampai ideologi. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem multipartai.

B. Sejarah Partai Politik

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat.

Pada permulaannya peranan partai politik di Negara Barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat.

Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis. Perkembangan selanjutnya adalah dari Barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di Negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika.

Partai politik di Negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia (Waktu itu masih Hindia Belanda) serta India. Dan dalam perkembangannya akhir-akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di Negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu Negara.

Sejarah partai politik di Indonesia partai politik yang pertama di Indonesia adalah De Indische Partij yang pada 25 Desember 1912 dibentuk Douwes Dekker, Tjipto Mangunkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Sekalipun paham Indonesia baru ditegaskan pada 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda, namun para pendiri partai politik ini sudah dilandasi oleh pikiran bahwa seluruh rakyat Hindia Belanda merupakan kesatuan.

Pada tahun 1911 Haji Samanhudi membentuk Serikat Dagang Islam (SDI) sebagai organisasi untuk mengejar perbaikan nasib rakyat Indonesia dalam daerah jajahan Hindia Belanda. Pada tahun 1912 Haji Oemar Said Tjokrominoto memberikan kepada Serikat Dagang Islam (SDI) nama baru, yaitu Serikat Dagang Islam (SDI) nama baru, yaitu Serikat Islam (SI) karena

hendak meluaskan perjuangannya tidak terbatas pada bidang ekonomi saja.

Dengan begitu Serikat Islam (SI) juga melakukan perjuangan politik.¹⁹

Meskipun tidak secara resmi dinamakan partai politik, tetapi melihat sifat perjuangannya Serikat Islam (SI) adalah satu partai politik. Maka boleh dikatakan bahwa sejarah partai politik di Indonesia, baik yang berorientasi nasionalisme, agama maupun sosialisme. Di masa penjajahan Belanda jelas sekali bahwa mayoritas partai politik bertujuan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, kecuali beberapa partai politik yang dibentuk orang-orang Belanda atau orang-orang yang dekat dengan kepentingan penjajahan Belanda.

Partai yang menonjol adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mulanya bernama Perserikatan Nasional Indonesia, dibentuk pada 4 juli 1927 oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Tjokrohadisuryo dan Mr. Sunaryo. Kemudian pada tahun 1928 berganti nama menjadi nama menjadi Partai Nasional Indonesia dan dipimpin oleh Ir. Soekarno atau Bung Karno yang pada 17 Agustus 1945 bersama Drs. Mohammad Hatta

¹⁹Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 60

memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia atas nama rakyat Indonesia.²⁰

Pada 1945, setelah pemindahan kekuasaan sampai ke tangan para pendiri bangsa Indonesia, parpol yang sudah disebutkan di atas hidup kembali. Persaingan partai politik berlangsung secara terbuka. Saya akan menjelaskan dengan membagi dinamika parpol dalam perpolitikan di Indonesia ke dalam beberapa fase politik agar pembaca mudah mencerna:

1. Masa demokrasi liberal (1945-1959)

Masa ini ditandai dengan kebebasan mendirikan parpol. Peranan partai politik sangat dominan dalam struktur pemerintahan. Namun demikian, dominasi parpol justru menciptakan kerentanan terhadap perpecahan. Masing-masing elit politik mementingkan golongannya atau parpolnya yang mengusungnya. Pemerintahan berjalan tidak stabil. Masa demokrasi liberal berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

2. Masa demokrasi terpimpin (1959-1966)

Pada masa ini, peran Presiden sangat dominan dalam struktur pemerintahan. Parpol melemah karena wewenangnya dibatasi sebagaimana

²⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 160-161

tertulis dalam Dekrit Presiden. Namun dinamika politik meruncing pada rivalitas tiga kubu besar, yaitu antara Sukarno yang didukung PNI, PKI yang berhaluan komunis, dan Militer. Periode ini berakhir dengan adanya peristiwa yang disebut oleh rezim setelahnya sebagai G 30 S / PKI.

3. Masa orde baru (1966-1998)

Parpol pada masa ini dirampingkan oleh rezim Orde Baru. Jumlah partai disederhanakan menjadi tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). PPP merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam. Golkar adalah partai penguasa. PDI merupakan gabungan dari Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba, dan PKI. Pada masa ini, wakil rakyat dipilih oleh Presiden. Masa orde baru berakhir setelah peristiwa reformasi 1998.

4. Masa reformasi (1998-sekarang)

Masa ini dimulai setelah mundurnya Suharto dari kursi presiden. Parpol yang semula tiga berkembang biak menjadi 48 yang ikut serta pada pemilu 1999. Reformasi berhasil mengubah struktur politik secara fundamental. Pemimpin pemerintahan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden serta wakil rakyat sejak pemilu 2004 dipilih langsung oleh rakyat. Sampai saat

ini, Indonesia masih mengadopsi sistem multipartai kendati jumlahnya tidak selalu konsisten.

C. Fungsi Partai Politik

1. Parpol sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu proses kaderisasi dan upaya-upaya lain untuk meraup suara pemilih.
2. Parpol sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu penyampaian visi dan misi politik kepada publik yang merupakan subjek dari kebijakan politik.
3. Parpol sebagai sarana pengatur konflik, yaitu penawar konflik yang bersumber dari perbedaan kepentingan individual atau golongan.
4. Parpol sebagai sarana komunikasi politik, yaitu proses mempertahankan atau menolak argumentasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

²¹Rahmlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia, 2010) hlm. 152-153

D. Hak dan Kewajiban Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pada pasal 12 dan 13 telah mengartikan hak dan kewajiban Partai Politik, Sebagai Berikut:

1. Partai Politik berhak:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Negara.
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengusulkan perberentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik.
- k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Partai Politik berkewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.

- b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan Nasional.
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.
- f. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
- g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
- h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat.
- i. menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- j. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.²²

²²Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 12 dan Pasal 13.

E. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Sumatera Utara menurut Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatra Utara Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124 tentang Pergantian Antar Waktu.

Pasal 121:

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara terbanyak dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 122:

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) Komisi Pemilihan Umum menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon, pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur mengusulkan pergantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan pemberhentian.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan pergantian antar waktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam

Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

(6) Dalam hal gubernur tidak mengusulkan pergantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri Dalam Negeri meresmikan pergantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pemimpin DPRD.

(7) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam pasal 30 dalam rapat paripurna.

(8) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 123:

(1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

(2) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

- (3) Pergantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap di proses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (5) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.²³

F . Pengertian Partai Politik Dalam Islam

Dalam Al-quran istilah partai disebut dengan perkataan *Hizb*. Partai (*Hizb*) secara lughawi mempunyai makna: Pertama, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas. Kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan. Ketiga, kader serta partisipannya. Mengikuti pengertian istilah, partai atau *Hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.²⁴ Perkataan *Hizb* terdapat dalam Al-quran, diantaranya:

²³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara.

²⁴Muhammad Imarah, *Ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami*, Kairo: Nadhah Mishr, 1419, hlm. 184

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ

إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

Artinya: “Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh telah bersekutu, mereka berkata, “inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan Maha Besar Allah dan Rasul-Nya. “Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka keimanan dan ketidak patuhan” (Q.S. Al-Ahzab; 22).²⁵

Istilah partai dalam peraturan politik hari ini sudah sangat membaaur dengan kehidupan manusia, baik yang muslim atau bukan. Kecuali negara-negara yang menganut sistem monarki seperti Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalm dan sebagainya. Sementara hamper semua Negara lain di dunia hari ini menganut sistem partai sebagai salah satu atribut politik negaranya.

Sebahagian ulama dan pakar *Fiqh Siyasah* menganggap perpecahan umat islam pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang berperang dengan pihak Mu'awiyah di shiffin sebagai punca wujudnya partai-partai politik dalam islam. Mereka beranggapan kehadiran aliran Khawarij, Syi'ah dan Mu'tazilah pasca perang siffin yang kemudian muncul juga Ahlus Sunnah wal-Jama'ah, Murji'ah dan sebagainya sebagai punca utama munculnya

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 421

partai politik dalam islam. Namun apa yang menjadi perhatian disini adalah pada waktu itu tidak satu golongan dari mereka yang menamakan kelompoknya sebagai partai politik. Mereka justru menamakan kelompoknya sebagai sekte yang mandiri dan tidak mau mengikuti sekte lain karena menganggap sektenya lebih baik. Jadi perpecahan ummah yang berfirqah-firqah waktu itu lebih menjurus kepada pihak ajaran agama bukan kepada sistem politik. Mereka juga tidak berkampanye untuk menentukan kepala Negara sebagaimana layaknya usaha partai politik hari ini.

Para pakar *Siyasah* dalam beberapa bukunya mengaitkan persoalan partai politik dengan perkataan *Hizb* dalam Al-quran. Mereka menyimpulkan perkataan *Hizb* adalah istilah partai pada zaman modern ini, mereka juga merujuk kepada firman Allah dalam Al-quran: “*Kullu hizbi bima ladaihim faarihun* (Tiap-tiap golongan (partai) merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)”. Dalam ayat lain Allah berfirman: “*Minallazyna farraquw minhum wakaanu syiya’a Kullu hizbi bima ladaihim faarihun*” (yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan).

Sebuah partai politik merupakan satu organisasi yang mengikat anggotanya sesuai dengan ketentuan partai yang bertujuan untuk

memenangkan pemilu dalam rangka menggapai sejumlah kursi di parlemen. Apabila partai tersebut menang mutlak atau mayoritas di parlemen maka mereka akan membentuk pemerintahan Negara sesuai dengan kehendak partai tersebut. Ada persoalan esensial yang perlu diperbincangkan dalam hal ini adalah: apabila partai tersebut bernuansa islam sebagai sebuah partai islam yang mengutamakan hukum islam bagi rakyatnya, maka keberuntungan barangkali ada dipihak muslim. Tapi kalau partai memenangkan pemilu tersebut bukan partai islam dan tidak mengutamakan hukum islam walaupun partai kafir, maka bias dipastikan malapetaka dan bencana politik paling besar akan menimpa ummat islam dalam wilayah mayoritasnya.²⁶

G . Sejarah *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd*

Sejarah lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan islam adalah *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd*. Dalam sejarah islam pembentukan lembaga *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Sepanyol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk majelis al Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar Negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan

²⁶Lukman Thaib, *Politik Menurut Perspektif Islam*, Malaysia: Synergymate Sdn, 1998, hlm. 211.

pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah Negara. Jadi, daulat Bani Umayyah II di Sepanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.

H .Kedudukan *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd*

Ahl al-h{all wa Al-'Aqd merupakan bagian dari Ulil Amri. Ulil Amri yang kaum mukminin diperintahkan untuk taat kepada mereka bukanlah para elite umara dan penguasa bagaimanapun keadaan mereka. Tidak ada yang menyebabkan hilangnya prinsip musyawarah kaum muslimin selain pemahaman seperti itu (memahami bahwa ulil amri adalah elite umara dan penguasa).

Ulil amri juga bukan orang-orang elite yang dikenal dalam fikih islam dengan sebutan "fukaha" atau mujahid yang mereka harus menguasai sejumlah disiplin ilmu bahasa dan ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadits. Sebab pengetahuan mereka tidak sampai kepada sisi ini dan tidak biasa meneliti untuk mengetahui sebagian besar urusan-urusan umum, seperti urusan perdamaian, peperangan, pertanian, perdagangan, perindustrian,

administrasi, dan politik. Benar mereka mempunyai bidang khusus yang dapat mereka ketahui dengan sebenar-benar pengetahuan. Mereka ahli dan ulil amr di bidangnya tersebut.

Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd adalah yang dimaksud dengan ulil amri dalam kitab Allah, para wakil rakyat. Karena lebih dekat dengan kebenaran dalam tafsiran istilah “ulil amri”, dan lebih cocok dengan dua ayat surah An-Nisa ayat 58-59.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat*”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.²⁷

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 88-89

Dua ayat ini juga menjadi landasan risalah Ibnu Taimiyah yang berjudul *As-Siyasah Ash-Syar'iyah*, dan dia berkata: sesungguhnya ayat pertama menyebutkan tentang ulil amri yang melakukan perintah itu (perintah menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memutuskan perkara antara manusia dengan adil). Kecuali apabila mereka menyuruh untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika mereka menyuruh untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Swt maka tidak ada kata taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada khaliq.

Dua ayat menunjukkan bahwa ketaatan yang diwajibkan terhadap ulil amri didedikasikan pada orang yang dinamakan di zaman sekarang dengan sebutan “dewan esekutif” atau “pemerintah dan penguasa”, sebagaimana juga didedikasikan pada *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* yang telah dipercayai oleh rakyat dan ditaati dalam segala keputusan yang diputuskan dengan musyawarah, dan keputusan undang-undang sipil dan politik. Mereka ini juga disebut dengan ulil amri. ulil amri yang bertindak sebagai wakil kekuasaan rakyat.

Oleh karena itu, kelompok para penguasa dari para pejabat disebut dengan “ulil amri esekutif” dan kelompok *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* dengan sebutan “ulil amri legislatif dan dewan pengawas pejabat”.²⁸

Kedudukan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan islam itu ternyata berbeda-beda menurut para pakar hukum ketatanegaraan, secara substansi sama tetapi dalam stressing dalam kedudukannya terdapat perbedaan sebagai berikut:

1. Menurut Abd al-Waahhab Abd al- Aziz al-Syisyani menyatakan tugas ulil amri yang termasuk dalamnya *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* ada empat macam, yakni:
 - a. Mengatur perkara-perkara duniawi (*Al- Isyra>f a|la Syu>n al- Dunya>*).
 - b. Melindungi agama (*bimayah al-din*) dari keinginan pihak-pihak tertentu, terutama dari kalangan internal umat islam untuk mengubah ajaran-ajaran agama islam.
 - c. Melindungi wilayah islam dari serbuan musuh yang datang dari lahir.
 - d. Menjaga solidaritas umat islam dan menghindarkannya dari berbagai macam bentuk pertikaian dan perpecahan.

²⁸Abdul Khaliq Farid, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005), Hlm. 83-87

2. Menurut Al-Mawardi kedudukan lembaga *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* dalam ketatanegaraan islam, yaitu kedudukan anggota *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* ini setingkat dengan pemerintah, karena majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah Negara.²⁹

3. Kedudukan *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* atau lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan islam yaitu:

a. *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* mempunyai kedudukan yang penting dalam pemerintahan islam. Antara khalifah dan *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat.

b. Kedudukan *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih khalifah dan mengawal khalifah menuju kemaslahatan umat.

²⁹Bagus Setiawan, *Kedudukan DPD RI dalam Sistem sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasa Dusturiyah*, (Skripsi Program Sarjana Syari'ah dan Hukum, Bandar Lampung: 2017), hlm. 29-30

c. Jadi kedudukan *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri tanpa intervensi dari khalifah.³⁰

I . Peran *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd*

Ahl al-h{all wa Al-'Aqd merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berperan menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenangnya lembaga perwakilan dalam islam secara umum *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* adalah Ahlul ikhtiyar dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja. Disamping itu harus ijtihad anggota *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

³⁰Frenki, *Sistem Politik dan ketatanegaraan Islam*, (Satuan acara perkuliahan, Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017, hlm. 35.

Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd juga mengadakan sidang untuk memilih imam, mereka harus mempelajari dari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imammah, kemudian memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihananya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaiaatnya.³¹

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa tugas *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* sebagai berikut:

1. *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan baiat in’iqad kepada khalifah. Imam al-mawardi berkata “jika *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* telah berkumpul untuk memilih, maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan imamah (khalifah), yang memenuhi seluruh persyaratannya. Mereka harus men-dahulukan yang paling banyak kelebihananya, yang paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera ditaati rakyat, tanpa bergantung pada pembaitannya.
2. *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.

³¹Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthaniyah*, penerjemahan Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 6

Disinilah perlunya al-sulthah al-tasyriyah tersebut diisi oleh para mujahid dan ahli fatwa, mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Di samping itu harus ijtihad anggota legislative atau *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* harus mengacu pada prinsip jalb al-mashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat dan tidak memberatkan mereka.³²

Menurut Khalid Ali Muhammad al-Anbari, Ulil amri termasuk dalamnya *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* memiliki enam macam tugas sebagai berikut:

1. Tugas di bidang keagamaan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan ilmu-ilmu agama
 - b. Menghormati ahli-ahli ilmu agama
 - c. Meminta pandangan para ahli agama dalam soal hukum menyangkut masalah keagamaan

³²*Ibid*, hlm.24

- d. Memberantas bid'ah dan mengambil tindakan undang-undang sesuai hukum yang berlaku terhadap orang yang mengamalkannya untuk memelihara agama dari pada kecacatan dan melindungi umat islam dari kesesatan.
 - e. Mendukung tegaknya syiar-syiar islam, misalnya memberikan dukungan untuk dikumandangkannya adzan dan iqamah di berbagai mejid dan mushala sebagai penanda telah masuknya waktu shalat lima waktu.
 - f. Menjadi imam sholat.
 - g. Menyampaikan khotbah.
 - h. Menentukan permulaan dan akhirpelaksanaan ibadah puasa.
 - i. Menyediakan kemudahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
2. Tugas di bidang pertahanan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Berjihad menentang kaum musrikin yang memusuhi kaum islam.
 - b. Memerangi pemberontakan dan membentuk angkatan bersenjata yang tangguh termasuk menetapkan gaji dan tujangan yang memadai, sehingga para tentara yang bergabung dalam angkatan bersenjata itu dapat hidup layak dengan gaji yang diterimanya.
3. Tugas di bidang kehakiman, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menegakan keadilan dan menumpas kezaliman.
 - b. Melaksanakan hudud (hukum) syariah agar segala larangan Allah tidak diperolok-olok dan hak-hak manusia tidak dilanggar.
 - c. Memisahkan kekuasaan esekutif daripada kekuasaan yudikatif dengan melantik pejabat dan hakim yang mampu mengemban tugas untuk mencegah terjadinya pertikaian dan kezhaliman. Sehingga semua pihak, baik pihak yang kuatmaupun yang lemah, ataupun pihak yang hina dan yang mulia memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.
4. Tugas di bidang keuangan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Memungut dan mendistribusikan zakat, jizyah, fai, dan kharaj.
 - b. Memberi perhatian kepada harta-harta yang diwaqafkan untuk tujuan kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.
5. Tugas di bidang pemerintahan Negara, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Memilih mereka yang berkeelayakan untuk melakukan tugas-tugas yang ada kaitannya dengan kepentingan kaum muslimin dan orang banyak. Sehingga tugas yang dipercayakan kepadanya dapat dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

b. Mengontrol pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan umat, sehingga tugas yang dipercayakan kepadanya dapat dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

6. Tugas untuk merealisasikan kehidupan yang baik untuk setiap individu rakyat dalam berbagai dimensi.

Menurut Abd al-Syisyani menyatakan tugas Ulil amri yang termasuk di dalamnya *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* ada empat macam yakni:

1. Mengatur perkara-perkara duniawi (*Al- Isyra>f a|la Syu>n al- Dunya>*).
2. Melindungi agama (bimayah al-din) dari keinginan pihak-pihak tertentu, terutama dari kalangan internal umat islam untuk mengubah ajaran-ajaran islam.
3. Melindungi wilayah islam dari serbuan musuh yang dating dari luar.
4. Menjaga solidaritasw umat islam dan menghindarkannya dari berbagai macam bentuk pertikaian dan perpecahan.³³

Hampir senada dengan pendapat al-Anbari, al-Mawardi menyatakan tugas Ulil amri yang termasuk dalamnya *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* ada sepuluh macam yaitu:

³³Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani, *Huquq al-Insan wa Hurryyatuh al-Assasiyah fi al-Nizam al-Nuzhum al-Mu’ashirah* (Mathabi al-Jami’iyyah al-Mulkiyyah, 1400 H/1980) cet. 1, hlm. 611.

1. Mempertahankan dan memelihara agama.
2. Menegakan hukum dan keadilan terhadap pihak-pihak yang berperkara.
3. Melindungi wilayah islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya.
4. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum tuhan.
5. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
6. Melaksanakan jihad untuk menghadapi pihak-pihak yang memusuhi islam.
7. Memungut zakat, pajak dan mendistribusikannya kepada yang berhak.
8. Mengatur penggunaan harta bayt almal (kas Negara) secara efektif.
9. Melantik orang yang jujur dan berkualitas untuk mengurus keuangan negara.
10. Memantau pekerjaan dalam rangka pembangunan negara dan menjaga agama.

Berdasarkan pandangan-pandangan tiga para pakar hukum tata negara dalam islam tersebut diatas ditegaskan bahwa pokok *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* adalah mencalonkan dan memilih calon khalifah sesuai dengan syari'at islam, mensejahterahkan rakyat dan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan syari'at islam.

Sedangkan kewenangan lembaga *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* adalah:

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya:
2. Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Menegakan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadits.
 - b. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
 - c. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dengan semangat syariat.
3. Memilih dan membaiai khalifah. *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* berwenang memilih dan membaiai khalifah yang tugasnya adalah meminta pertanggung jawaban khalifah.
4. Menjalankan fungsi Pengawasan dalam kebijakan pemerintah. *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam Negara.³⁴

³⁴*Ibid*, hlm. 26.

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah DPRD Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara.

Pembentukan Provinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19.Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya berdasarkan surat keputusan Penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah provinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di pulau Jawa, berangsur-angsur dibentuk Komite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur melalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No 2/ MGS yang isinya sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1945.

Dalam Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di Provinsidan Keresidenan, otonom.Daerah-daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri.

DPRD membentuk suatu Badan Esekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk.

Dalam sidangnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub administrasi dibagi dalam sub provinsi, yaitu:

1. Sub Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli.
2. Sub Provinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatra Barat, Jambi dan Riau.
3. Sub Provinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung, Lampung dan Palembang.

Tiap sub provinsi dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai kordinator dari Keresidenan dan jabatan pemerintah yang ada di wilayahnya. Pemerintahan Sumatera Utara dijalankan sesuai dengan maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang

menyatakan bahwa pemerintah provinsi disesuaikan dengan pemerintah pusat.

Pembentukan DPRD Sumatera Utara menjadi Daerah Otonom yang dilegalisasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa Provinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Esekutif.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di bawah Menteri-Mentri dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah otonom.

Kepemimpinan Gubernur Muda di setiap sub provinsi berjalan terus sebagai suatu daerah administrative yang dalam praktiknya mengatur rumah tangganya masing-masing, sehingga provinsi Sumatera Utara seolah-olah terdiri atas 3 provinsi.

Pemerintah Pusat menyadari hal tersebut lalu menetapkan UU No 10/1948 tentang pembagian Sumatera menjadi 3 Provinsi, yaitu:

1. Provinsi Sumatera Utara

2. Provinsi Sumatera Tengah

3. Provinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota-anggotanya berasal dari masing-masing sub provinsi terdahulu. Dengan Undang-Undang No 24/ 1956 dibentuklah Provinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Provinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli.

Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 10/1974 dan Undang-Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera yang kemudiasn diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 42/ 1948 maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas-tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan.³⁵

B. Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara

DPRD mempunyai Fungsi:

1) Fungsi Legislasi, membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Gubernur.

³⁵Hardi, Konsultan Persidangan, Wawancara di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada 1 Juli 2019.

- 2) Fungsi Anggaran, merencanakan, menyusun, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama pemerintah.
- 3) Fungsi Pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

C. Tugas dan Wewenang DPRD Sumatra Utara

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

1. Membentuk Perda bersama Gubernur.
2. Membahas dan Memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan, Perda, APBD, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan /atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
5. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di Daerah.

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi Sumatera Utara

Secara Kelembagaan DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu:

1. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang paling penting dan strategis serta

berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara pasal 10 tentang hak dan pasal 30 tentang kewajiban Anggota DPRD secara personal mereka mempunyai hak:

1. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
2. Mengajukan Pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Membela diri
6. Imunitas
7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
8. Protokol
9. Keuangan dan administrative

Secara Personal, Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia.
- d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- g. Menaati Tata Tertib dan Kode Etik.
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- j. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

- k. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konsituen di Daerah Pemilihannya.³⁶

E. Struktur Organisasi DPRD Provinsi Sumatera Utara

1. Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Utara

Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pemimpin
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan Legislasi Daerah
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Kehormatan
- g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna DPRD

2. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara

Pimpinan DPRD Sumatera Utara terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yakni:

³⁶ Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 4/k/2014

Tabel I.

Pimpinan DPRD Provinsi Sumatra Utara Periode 2014-2019

NO	NAMA	JABATAN
1	H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos	KETUA
2	RUBEN TARINGAN, SE	WAKIL KETUA
3	H.T MILWAN	WAKIL KETUA
4	SRI KUMALAM, SE, MM	WAKIL KETUA
5	ADUHOT SIMAMORA	WAKIL KETUA

3. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

4. Komisi

Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap Anggota DPRD Bkecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi

Jumlah komisi di DPRD Sumatera Utara terdiri dari 5 (lima) komisi yaitu:

a. Komisi A (Bidang Pemerintahan)

Meliputi bidang tugas pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan. Penerangan/ pers, Hukum, Perundang-undangan Hak Azasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan penanganan KKN, Perijinan, Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi/Peruntukan Tanah, Wilayah Kelautan Daerah, Perlindungan Konsumen.

b. Komisi B (Bidang Perekonomian)

Meliputi bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, Perbangkan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan-Pengandaan Logistik, Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Pertambangan dan Energi Pengelolaan potensi wilayah laut Daerah.

c. Komisi C (Bidang Keuangan)

Meliputi bidang tugas Keuangan, Perpajakan dan Restrebusi, Pemegang Kas Daerah/Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Badan

Usaha dan Penanaman Modal, Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah.

d. Komisi D (Bidang Pembangunan)

Meliputi bidang tugas Pembangunan, Pekerjaan Umum, Pengendalian Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat.

e. Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Meliputi tenaga Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pengembangan Peranan Perempuan, Mobilisasi Penduduk.

5. Badan Legislasi

Badan legislasi daerah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk pada pemulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan Tahun Sidang dalam Rapat Paripurna DPRD. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu Komisi.

Susunan Badan Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua beserta 16 anggota yang berasal dari seluruh fraksi dan komisi-komisi yang ada di DPRD Sumatera Utara.

6. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Badan Anggaran diusulkan setiap tahun oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotannya dalam tiap-tiapnya Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

Susunan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua yang merupakan pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Beserta 40 anggota yang berasal dari fraksi dan komisi-komisi yang ada di DPRD Sumatera Utara.

7. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi dengan jumlah 7 (tujuh) orang.

Susunan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari seseorang ketua dan wakil ketua beserta lima orang anggota yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dari setiap fraksi dan bukan mewakili setiap komisi di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

F. Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Utara

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD. Setiap Anggota DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD. Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dapat membentuk 1 (satu) Fraksi gabungan dimana jumlah Fraksi paling banyak 2 (dua) Fraksi.

Pada periode saat ini (2014-2019) terdapat 9 (Sembilan) Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu:³⁷

1. Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR)	: 17 kursi
2. Fraksi Partai PDI Perjuangan	: 16 kursi
3. Fraksi Partai Demokrat	: 14 kursi
4. Fraksi Partai Gerindra	: 13 kursi
5. Fraksi Partai Hanura	: 10 kursi
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	: 9 kursi
7. Fraksi Partai Amanat Nasional	: 6 kursi
8. Fraksi Partai Nasdem	: 5 kursi

³⁷ www.dprd-sumutprov.go.id di akses 1 juli 2019

9. Fraksi Partai Persatuan Keadilan Bangsa : 10 kursi

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Alasan-Alasan Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai

Politik

1. Mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Sumatera Utara menurut Undang-Undang.

Berbicara tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) memiliki pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan suatu hal yang menurut Peraturan Perundang-undangan. Misalkan seperti hal yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatra Utara Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124 tentang Pergantian Antar Waktu.

Pasal 121:

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh

suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara terbanyak dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 122:

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) Komisi Pemilihan Umum menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimannya surat pimpinan DPRD.

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon, pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur mengusulkan pergantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan pemberhentian.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan pergantian antar waktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal gubernur tidak mengusulkan pergantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri Dalam Negeri meresmikan pergantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pemimpin DPRD.

- (7) Sebelum memegang jabatannya, anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam pasal 30 dalam rapat paripurna.
- (8) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 123:

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Pergantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap di proses, dengan tidak dilakukan penggantian.

(5) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

2. Alasan-Alasan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara

Setelah penulis penulis mewawancarai tentang bagaimana mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya penulis mewawancarai tentang alasan-alasan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang Pindah Partai pada Periode 2014-2019. Untuk menjawab itu dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

Ketika penulis terjun langsung ke lapangan untuk meneliti, peneliti menemukan bahwa banyak anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019 yang Pindah Partai. Ada 6 (enam) nama yang bersangkutan berserta alasanya:

1. Syahrial Tambunan

Syahrial Tambunan lahir di Pematang Siantar pada 27 November 1960, Beragama Islam. Berasal dari Partai Demokrat yang berpindah partai ke NasDem, Syahrial Tambunan berpindah Partai diakarenakan adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ideologi yang sudah tidak sejalan antara politisi dengan partainya dan Faktor tawaran pindah dari partai lain

dengan iming-iming alat peraga kampanye. Syahril Tambunan digantikan oleh Hj. Jamilah.³⁸

2. Astra Yudha Bangun

Astra yang merupakan mantan Kolega Ramces di DPRD Provinsi Sumatera Utara dan berasal dari Partai Gerindra yang berpindah ke Partai PDIP. Selama beberapa tahun dia duduk sebagai anggota dewan periode 2014-2019 sebelum di pecat partainya. November 2018 dia resmi diganti setelah penggantinya dilantik melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Astra berpindah partai dikarenakan adanya konflik antara ideologi politisi dengan ideologi partainya, Upaya Politik dan Hukum sempat astra lakukan dengan berkirim surat. Berharap dipanggil oleh Mahkamah Partai dan melakukan pembelaan diri. Namun tidak digubris. Dijelaskan oleh Pandapotan selaku mantan komisioner KPU Kota Medan menurutnya pun bagaimana mungkin partai besutan Prabowo Subianto tersebut akan bias menegakan hukum jika kepada kadenya sendiri mereka tidak mematuhi hukum.³⁹

Astra Yudha Bangun digantikan oleh Robert Luban Tobing.

³⁸Hanalson, Sekjen DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Wawancara di Kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pada tanggal 5 Juli 2019

³⁹<http://www.mdn.biz.id/o/65986/>

3. Rony Ronaldo Situmorang

Rony Ronaldo Situmorang lahir di Kupang pada 15 Desember 1982, Beragama Kristen, Berasal dari Partai Demokrat yang berpindah Partai Ke Partai Nasdem. Rony Ronaldo Situmorang berpindah Partai dikarenakan adanya beberapa Faktor .

Faktor ideologi, tidak sejalan ideologi politisi dengan partainya. Menurut Rony, kalau politisi memiliki ikatan ideologi yang kuat dengan partainya, maka tidak akan pindah partai. Faktor konflik internal di partai asal, membuat partai politik terbelah, sehingga politisi jadi tidak nyaman dan mencari partai yang stabil. Faktor kekhawatiran terhadap masa depan partai. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu mengatur Partai Politik akan tetap bertahan di DPR RI jika memenuhi syarat *parliamentary threshold* minimal empat persen. Adanya tawaran pindah dari Partai lain dengan iming-iming alat peraga kampanye maupun insentif dana kampanye. Rony Ronaldo Situmorang juga berbahagia dikarenakan terpilihnya Menjadi DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024.⁴⁰

Rony Ronaldo Situmorang digantikan oleh Megalia Agustina

4. Jeny Riany Luci Brutu

⁴⁰Rony Ronaldo Situmorang, Wawancara di Kantor Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 2019

Jeny Riany Luci Berutu lahir di Laras Pada 3 Februari 1958, Beragama Katolik, Berpindah Partai dari Partai Demokrat ke Partai Nasdem. Jeny berpindah Partai dikarenakan beberapa faktor yakni faktor ideologi yang sudah tidak sejalan antara politisi dengan partainya dan Faktor tawaran pindah dari partai lain dengan iming-iming alat peraga kampanye.

Jeny Riany Luci Brutu digantikan oleh Layari Simutaban.⁴¹

5. Januari Siregar

Januari Siregar lahir di Sei Buah Keras pada 2 juni 1961, Beragama Kristen berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang berpindah ke Partai Perindo.

Januari yang terpilih menjadi anggota DPRD Sumut pada 2014 diberhentikan partai asalnya karena berpindah partai asalnya karena berpindah pada Pemilu Legislatif 2019. Dia kini menjadi Caleg dari Partai Perindo.

Pergantian Januari menjadi PAW yang kesekian kalinya di tubuh DPRD Sumut. Tak hanya karena pindah partai, beberapa anggota diganti

⁴¹Hanalsen, Sekjen DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Wawancara di Kantor DPD Partai Demokrat Sumatra Utara pada tanggal 5 Juli 2019

karena berhalangan tetap. Mereka ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tindak korupsi yang pernah dilakukan.⁴²

Januari Siregar digantikan oleh Royana P. Marpaung

6. Parlinsyah Harahap

Parlinsyah Harahap dilahirkan di Gunung Tua, Pada 18 Oktober 1986. Beragama Islam, Berpindah Partai dari Partai Gerindra ke Partai Demokrat. Parlinsyah menjabat sejak 2014 sah diberhentikan dari jabatan wakil ketua DPRD Sumatera Utara Pasca terbitnya surat Kemendagri No. 161.12-5564/2018. Pemberhentian tersebut berdasarkan keputusan DPP Gerindra atas usulan DPD Partai Gerindra Sumatera Utara.

Meski awalnya sempat menolak karena pelengseran dirinya sebagai pimpinan dewan tidak melalui mekanisme Mahkamah Partai di Partai Gerindra, Sesaat setelah paripurna dia mengaku legowo. “Aman itu, Aman,” katanya kepada awak media dan sejumlah koleganya di DPRD Sumut.

Lagian, dia juga akan segera mengundurkan diri dari DPRD Sumut karena telah pindah haluan ke Partai Demokrat untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut II. Menariknya, dia akan “bertarung” di daerah pemilihan yang juga diikuti oleh ketua DPD

⁴²<http://www.mdn.biz.id/o/61000/> di akses 6 Juli 2019.

Gerindra saat ini, Gus Irawan Pasaribu. Gus sendiri kini masih tercatat sebagai anggota DPR RI.

Sayangnya, Parlinsyah enggan membeberkan perkembangan proses hukum yang ditempuhnya untuk melawan pelengseran tersebut. “Intinya selamat kepada ibu Sri Kumala. Semoga bisa menjalankan amanah, “timpalnya.⁴³

Parlinsyah Harahap digantikan oleh Abdul Manan Nasution

B. Kewenangan DPRD SUMATERA UTARA dapat disesuaikan dengan kedudukan *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* dalam tinjauan Fiqh Siyasah

1. Mekanisme Pemilihan *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd*

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap dunia islam, pemikiran tentang *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* ini menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:

⁴³<http://www.mdn.biz.id/o/48042/> diakses 6 Juli 2019.

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilihan ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahl Al-hall wa Al-Aqd* sesuai dengan pilihannya.
2. Pemilihan anggota *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai intergeritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd*.
- 3 Di samping itu, ada juga anggota *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* yang diangkat oleh kepala Negara.

Di antara ketiga cara demikian, cara pertamalah yang kecil kelemahannya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa calon anggota *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* yang akan mewakilinya sesuai dengan pilihan terbaiknya. Adapun cara kedua sangat subjektif sehingga dapat menimbulkan penyimpangan. Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* untuk bersikap kritis terhadap penguasa,

karena ia diangkat oleh kepala Negara. Dengan demikian, posisinya tersubordinasi oleh kepala Negara. Dalam konteks ini, pengalaman bangsa Indonesia yang menggunakan sistem pengangkatan selain pemilihan dalam menentukan anggota *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* selama orde baru, mungkin dapat dijadikan contoh, betapa mereka tidak mampu bersikap kritis terhadap berbagai kebijaksanaan penguasa yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat.⁴⁴

2. Syarat-Syarat Menjadi *Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi*

Menurut Al-Mawardi syarat-syarat sebagai anggota *Ahlul Halli Wa Al-‘Aqdi*, Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:

1. Memiliki sifat ‘Adil yang mencakup semua syarat-syaratnya.
2. Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri imam tersebut.
3. Memiliki pendapat (ra’yu) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

3. Ciri-Ciri Pemimpin dalam Islam

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Op. Cit. hlm.164-166*

Agar bisa mengetahui hal apa saja yang menjadi pondasi kepemimpinan di dalam agama islam, yaitu:

1. Bertakwa Kepada Allah SWT

Untuk menjadi seorang pemimpin maka kita harus ditanamkan etika dan dasar kepemimpinan dalam islam yang kuat yakni sikap bertakwa kepada Allah SWT. Seperti yang tercantum di dalam QS. Al-Imran [3]:102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”*⁴⁵

Dasar atas taqwa disini memiliki unsur takut kepada larangan Allah SWT hingga nantinya ia selalu menjaga bagaimana ia berbuat dan menjaga perilakunya dengan baik. Selalu mengamalkan tentang hari akhir dan selalu memiliki rasa qinaah atau rela dengan sesuatu walaupun hanya terlihat sedikit dimata manusia.

2. Tanggung Jawab

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 64

Kepemimpinan adalah dasar dari sebuah tanggung jawab. Seperti yang dinyatakan di dalam Surat An-Nahl Ayat 93:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَنُسَلِّتَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Seperti yang dinyatakan di dalam ayat al-quran akan tanggung jawab, maka menjadi pemimpin berarti akan memikul tanggung jawab tidak hanya di dunia namun di akhirat kelak. Karena setiap pemimpin nantinya akan dimintai pertanggung jawaban mereka nantinya.

3. Musyawarah dan Istiqarah

Pemimpin harus pandai dalam mengajak para bawahan atau orang-orang yang ia pimpin untuk tetap bermusyawarah dengan baik. Dan selalu menerapkan sifat istiqarah atau berserah diri atas pilihan yang ditentukan oleh Allah SWT nantinya ini tercantum di dalam surat Asy-Syura Ayat 38:

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

Artinya : “Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum”⁴⁶

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 488

4. Adil

Pemimpin yang bertaqwa maka akan selalu berlaku adil terhadap apapun. Karena sikap ini adalah sikap yang terpuji dan sangat disukai oleh Allah SWT seperti yang tercantum di dalam Surah An-Nahl Ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁴⁷

5. Tidak Membebani Orang Lain

Sifat dasar kepemimpinan lain yang seharusnya dimiliki pemimpin dalam ajaran islam adalah tidak memberatkan apapun kepada orang lain apalagi diluar kemampuan orang tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah Ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

⁴⁷ Ibid, hlm. 278

Artinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”*.⁴⁸

6. Amanah (dapat dipercaya)

Pemimpin yang seharusnya memenuhi dasar syariat islam adalah dia yang amanah dan tidak munafik seperti yang digambarkan di dalam ayat-ayat al-quran tentang amanah di dalam QS. An-Nisa ayat 58, QS.Al-Mu'minin ayat 8, QS.Al-Ahzab ayat 72, QS. Al-Anfal ayat 27:

QS. An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 50

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”⁴⁹

QS. Al-Mu'minun ayat 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ

Artinya: “*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulkannya) dan janjinya.*”⁵⁰

QS. Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.*”

QS. Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*”⁵¹

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 88

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 343

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 428

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan-alasan Anggota DPRD Sumatera Utara yang pindah partai politik, yaitu:

- a. Faktor Ideologi Partai yang dimaksud yakni ikatan politisi dengan partainya sudah tidak sejalan. Kalau politisi memiliki ikatan ideologi yang kuat dengan partainya, maka tidak akan pindah partai begitu juga jika politisi yang ideologinya sangat lemah akan lebih mudah pindah partai lain.
- b. Faktor Konflik Internal di partai asal, membuat partai politik terbelah, sehingga politisi jadi tidak nyaman dan mencari partai yang stabil.
- c. Faktor Kekhawatiran terhadap masa depan partai. Berdasarkan amanah Undang-Undang Pemilu mengatur partai politik akan tetap bertahan di DPR jika memenuhi syarat parliamentary threshold minimal empat persen. Menurut penulis ada politisi yang khawatir partainya tidak bertahan di DPR sehingga pindah.
- d. Faktor Adanya tawaran pindah dari partai lain dengan iming-iming alat peraga kampanye maupun insentif dana kampanye.

2. Kewenangan partai politik pengusung terhadap anggota DPRD Sumatera

Utara menurut *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* dalam tinjauan Fiqh Siyasah yaitu dapat Islam pada awalnya tidak mengenal adanya partai politik, yang dapat dicari adalah benih partai politik pada masa awal islam seperti peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Bahwasanya dalam fiqh siyasah tentang anggota DPRD Sumatera Utara, Di dalam Al-Quran dan Hadits seorang pemimpin itu diharuskan amanah, tetapi Anggota DPRD Sumatera Utara yang pindah partai politik melanggar ciri-ciri pemimpin dalam Islam diantaranya yaitu tidak amanah. Maka partai politik pengusung terhadap anggota DPRD Sumatra Utara dapat memberhentikan anggota DPRD tersebut. Hal ini sesuai dengan fiqh siyasah karena pada masa khalifah Umar berkuasa istilah ini mengacu pada pergantian beberapa sahabat yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan Negara dan memilih pengganti kepala Negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjukan Umar menentukan siapa saja penggantinya setelah beliau meninggal. Memang pada masa ini eksistensi *Ahl al-h{all wa Al-'Aqd* belum ada, tetapi pada pelaksanaannya para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintah dengan

konsep siyasah yang mana kewenangan pemberhentian langsung dipegang oleh khalifah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan permasalahan Analisis Fiqh Siyasah tentang Anggota DPRD Sumatera Utara yang pindah partai Politik, Peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Anggota DPRD Sumatera Utara atau *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* dapat lebih memikirkan lagi tentang Amanah yang mereka jalankan sebagai pemimpin umat atau wakil rakyat.
2. kajian mengenai Anggota DPRD yang Pindah Partai Politik banyak terjadi pro dan kontra apalagi di pemilu 2019 ini. Di dalam islam juga tidak terdapat adanya sistem politik melainkan melalui sistem musyawarah yang dilakukan oleh *Ahl al-h{all wa Al-‘Aqd* . Oleh karna itu kita sebagai mahasiswa seharusnya lebih mendalami bagaimana sistem politik pada masa lampau sebagai acuan kita pada saat ini.
3. Pembahasan mengenai Partai Politik terutama hubungannya dengan lembaga eksekutif, legislatif serta yudikatif masih relatif sedikit, maka kedepanya saya

berharap teman-teman mahasiswa agar dapat memilih bagian-bagian seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI
- Abdul Khaliq Farid, *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005.
- Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani, *Huquq al-Insan wa Hurriyatuh al-Assasiyah fi al-Nizam al-Nuzhum al-Mu'ashirah* (Mathabi al-Jami'iyyah al-Mulkiyyah, 1400 H/1980 M.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthaniyah*, penerjemahan Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006
- Amirudin, Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pusaka, 2006.
- Bagus Setiawan, *Kedudukan DPD RI dalam Sistem sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi Program Sarjana Syari'ah dan Hukum, Bandar Lampung: 2017.
- Farid Abdul Kholiq, *Al- Fiqh As- Siyasiy Al-Islamiyy Mabadi Dusturiyyah Ash-Syura Al-'Adl Al- Musawah*, (Terj. Faturrahman A.Hamid, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Frenki, *Sistem Politik dan ketatanegaraan Islam*, (Satuan acara perkuliahan, Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017

Hasanudin Yusuf. *Partai Politik Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 1, Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2014.

Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam(Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Jimly Asshidiqie. *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konsitusi, Volume 3, Nomor 4, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konsitusi, Desember, 2006.

Kaelan, MS. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Lukman Thaib, *Politik Menurut Perspektif Islam*, Malaysia: Synergymate Sdn, 1998.

Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik-cet. Ketujuh*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Mawardi, *Al- Ahkaamus-Sulthaaniyyah wal-wilayatud-diniyyah*, penj. Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Mardalis. *Metode Penelitian Satu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Miftah toha. *Birokrasi Politik dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Puaka Utama, 2014.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2010.

Muhammad Imarah, *Ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami*, Kairo: Nadhah Mishr.

Ridho Al-hamdi. *Partai Politik Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Wawancara:

Hardi, Konsultan Persidangan, Wawancara Pribadi, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Utara, 22 Mei 2019.

Hardi, Konsultan Persidangan, Wawancara Pribadi, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Utara, 1 Juli 2019.

Hanalson, Sekjen DPD Partai Demokrat Sumatra Utara, Kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, 20 Mei 2019.

Hanalsan, Sekjen DPD Partai Demokrat Sumatra Utara, Kantor DPD Partai Demokrat Sumatra Utara, 5 Juli 2019.

Irwansyah, Demisioner KPU, Wawancara Pribadi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 21 Mei 2019.

Rony Ronaldo Situmorang, Wawancara Pribadi, Kantor Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sumatra Utara, 4 Juli 2019

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Peraturan DPRD Provinsi Sumatra Utara Nomor 4/k/2014 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatra Utara.

Internet:

www.dprd-sumutprov.go.id di akses 1 juli 2019

<http://www.mdn.biz.id/o/65986/> di akses 6 juli 2019

<http://www.mdn.biz.id/o/61000/> di akses 6 juli 2019

<http://www.mdn.biz.id/o/48042/> diakses 6 Juli 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa Bunut Barat Lk IV, Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan pada tanggal 16 November 1997, anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan suami isteri ayahanda Junaidi dan Ibunda Elly Ruslita. Lahir dari keluarga yang haus akan pendidikan, menyebabkan penulis harus menempuh pendidikan mulai dari jenjang sebagai berikut:

- a. Pendidikan tingkat TK di Pesatren Daar al-uluum di Kota Kisaran, Kab. Asahan pada tahun 2002-2003.
- b. Pendidikan tingkat SD di SDS HARAPAN BUNUT di Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan pada tahun 2003-2009.
- c. Pendidikan tingkat SMP di SMP NEGERI 5 KISARAN di Kota Kisaran, Kab. Asahan pada tahun 2009-2012.
- d. Pendidikan tingkat SMA di SMA NEGERI 3 KISARAN di Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan pada tahun 2012-2015.

Selama kuliah di UIN-SU, Penulis aktif di dalam berbagai kegiatan seperti seminar yang diadakan berbagai elemen intra dan ekstra kampus.